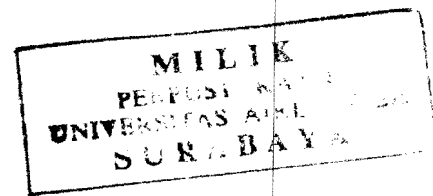


KIK  
Per 80/00  
Sul  
P

**SKRIPSI**

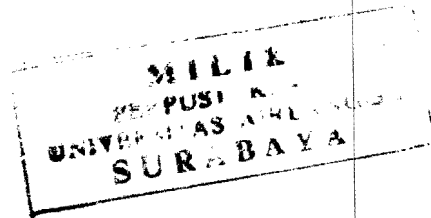
**EKI DICKY HERIYANA SOLEHUDIN**

**PERJANJIAN KERJA  
DI PT. PINDAD (PERSERO) DIVISI MUNISI  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

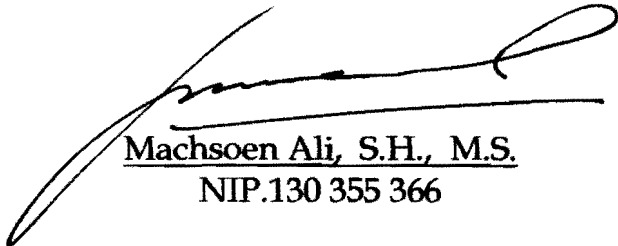
**PERJANJIAN KERJA  
DI PT. PINDAD (PERSERO) DIVISI MUNISI  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA**



**SKRIPSI**

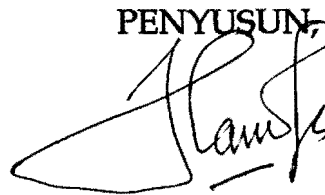
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR  
SARJANA HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Machsoen Ali".

Machsoen Ali, S.H., M.S.  
NIP.130 355 366

**PENYUSUN,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eki Dicky Heriyana Solehudin".

Eki Dicky Heriyana Solehudin  
NIM.039614360

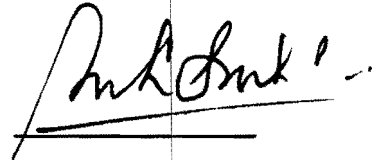
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**Skripsi ini telah diuji dihadapan Panitia Penguji**

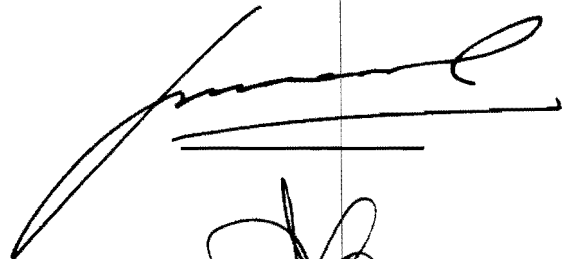
**Pada Tanggal : 3 Agustus 2000**

**Panitia Penguji Skripsi :**

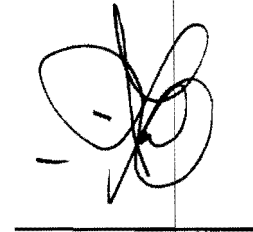
**Ketua : Dr. Marteen L. Souhoka, S.H., M.S.**



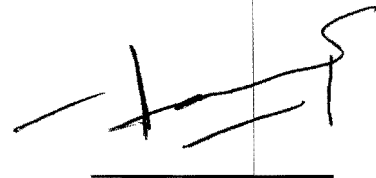
**Anggota : 1. Machsoen Ali, S.H., M.S.**



**2. R. Indiarso, S.H.**



**3. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**



## BAB IV P E N U T U P

### 1. Kesimpulan

Dari hasil uraian pada bagian-bagian sebelumnya, maka saya memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa bentuk perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. PINDAD Divisi Munisi adalah perjanjian kerja tertulis untuk waktu tertentu (dengan mengacu pada ketentuan pasal 1338 jo pasal 1603 huruf e KUH Perdata), yang mana diharapkan dengan bentuk tertulis itu maka surat perjanjian kerja itu memiliki nilai pembuktian yang kuat di mata hukum.

Dalam prakteknya, sebelum membuat surat perjanjian kerja tersebut, pekerja harus terlebih dahulu lulus dalam seleksi penerimaan yang meliputi seleksi di bidang administrasi, lulus tes akademik, lulus tes kesehatan, tes psikologi, tes mental ideologi kemudian membuat surat pernyataan sebagai pendahulu dalam pembuatan perjanjian kerja. Setelah dinyatakan lulus dari tes penerimaan pekerja tersebut barulah perusahaan dan pekerja membuat/menyetujui dan menandatangani surat perjanjian kerja yang formulasinya sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Akibat hukum yang akan timbul (muncul) setelah kedua belah pihak

menandatangani surat perjanjian kerja tersebut maka timbul perikatan/hubungan hukum antara keduanya dimana kedua pihak wajib menaati segala ketentuan yang ada/tercantum dalam surat perjanjian kerja tersebut.

- b. Bahwa keselamatan kerja merupakan pokok dalam melaksanakan perjanjian kerja, sebab hal tersebut mempengaruhi baik pekerja itu sendiri maupun perusahaan yang bersangkutan, dan untuk itu pihak perusahaan sangat memperhatikan mengenai faktor keselamatan dan kesehatan kerja dari para pekerjanya. Mengingat akan hal tersebut perusahaan telah mencantumkan segala hal yang berkaitan dengan keselamatan kerja dalam surat perjanjian kerja, antara lain mengenai resiko dari pekerjaan, fasilitas keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan, tanggung jawab perusahaan sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja dan diikutsertakannya seluruh pekerja dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sehingga surat perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan mengacu pada ketentuan yang ada pada UU Keselamatan Kerja Tahun 1970 sebagai undang-undang yang mengatur masalah keselamatan kerja di Indonesia. Dituangkannya klausula-klausula keselamatan kerja di surat perjanjian kerja diharapkan mampu memberikan rasa tenang, nyaman dan aman bagi pekerja yang baik secara langsung maupun tak langsung

dapat menimbulkan kegairahan dan meningkatkan produktivitas Undang Keselamatan Kerja tahun 1970 dapat tercapai sebagaimana tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang ada dalam perjanjian kerja tersebut.

## **2. Saran - saran**

Berpijak dari hasil penelitian selama disusunnya skripsi ini, saya akan memberikan saran-saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pihak perusahaan maupun pekerja, antara lain :

- a. Perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. PINDAD adalah perjanjian yang syarat dan isinya sudah ditentukan oleh pihak perusahaan tanpa mengikutsertakan pekerja, maka dari itu saya menyarankan agar sebaiknya perjanjian kerja dibuat bersama dengan pekerja atau wakil pekerja dalam Serikat Pekerja terutama mengenai syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak, sebab kedua belah pihak terikat dengan telah disepakatinya perjanjian kerja tersebut.
- b. Dalam hal kaitan antara perjanjian kerja dengan faktor keselamatan kerja yang diatur dalam UU Keselamatan Kerja

Tahun 1970, para pekerja sering menyimpangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja yang telah ditandatanganinya bersama dengan pihak perusahaan antara lain dengan tidak menaati aturan-aturan tentang keselamatan kerja yaitu dengan tidak menggunakan alat-alat keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan misalnya pada saat mereka sedang melakukan tugas mereka seperti tidak digunakannya pelindung telinga bagi mereka yang bekerja di bagian mesin yang bising dengan alasan mereka sudah terbiasa dengan situasi itu, padahal keadaan yang demikian itu disadari atau tidak akan menimbulkan bahaya dan merugikan pekerja itu sendiri yang secara tak langsung juga akan merugikan pihak perusahaan. Sehingga saya sarankan agar pihak perusahaan mengadakan pengawasan langsung ke tempat kerja dan bila ditemukan ada pekerja yang melanggar maka wajib dikenai sanksi, karena melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati. Selain itu perlu juga memberikan latihan/kursus dan pendidikan mengenai manfaat dan cara menggunakan alat-alat keselamatan kerja sehingga fasilitas keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pekerja dan juga memberikan keuntungan bagi perusahaan.